

Demokrasi Terpimpin Ala Sukarno: Analisis Historis Dan Reformulasi Kegagalan Demokrasi Terpimpin Di Indonesia

*Sukarno's Guided Democracy:
A Historical Analysis and Reformulation of the Failure of Guided Democracy in Indonesia*

Dewa Made Alit^a, Ni Luh Putu Tejawati^b, Oktaviani Suriyanti^c

Program Studi pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Jl. Seroja, Tonja No. 56 Denpasar, Bali, Indonesia

dewaalit@mahadewa.ac.id, tejawati@mahadewa.ac.id, vianisariyanti@gmail.com

Abstrak. Keruntuhan demokrasi tidak selalu diawali oleh kudeta, revolusi, ataupun penghapusan institusi politik secara tiba-tiba. Dalam sejumlah pengalaman historis, proses tersebut justru berlangsung perlahan melalui pemusatan kekuasaan, pelemahan institusi pengawasan, meningkatnya polarisasi elite, serta semakin terbatasnya ruang partisipasi publik. Analisis dilakukan melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, kemudian diperdalam melalui analisis kausal-kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keruntuhan Demokrasi Terpimpin tidak cukup dijelaskan oleh personalisasi kekuasaan di bawah Presiden Soekarno. Proses tersebut terbentuk melalui keterkaitan lima mekanisme, yakni pembesaran kekuasaan eksekutif, erosi institusional, polarisasi elite, meluasnya peran politik militer, serta pengendalian media dan ruang publik. Dari pola tersebut, hubungan antara tiga mekanisme utama dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional dirumuskan sebagai *Triadic Breakdown Mechanism*. Mekanisme ini menunjukkan adanya hubungan umpan balik: konsentrasi kekuasaan memperdalam polarisasi politik, polarisasi mengurangi kapasitas institusi dalam membatasi kekuasaan, dan pelemahan institusional pada gilirannya menyediakan ruang yang lebih luas bagi ekspansi eksekutif. Dengan demikian, Demokrasi Terpimpin dapat dipahami sebagai suatu trajektori kemunduran demokrasi yang secara bertahap berkembang menuju keruntuhan demokrasi. Perspektif ini sekaligus memperluas pembacaan historiografi politik Indonesia dengan menempatkan pengalaman Demokrasi Terpimpin dalam percakapan yang lebih luas mengenai otokratisasi dan erosi institusi demokratis.

Kata kunci: Demokrasi Terpimpin; keruntuhan demokrasi; kemunduran demokrasi; pembesaran eksekutif; polarisasi elite; erosi institusional; Indonesia.

Abstract. The collapse of democracy is not always precipitated by a coup, a revolution, or the sudden abolition of political institutions. Historically, the process often unfolds gradually through the concentration of power, the weakening of oversight institutions, escalating elite polarization, and the shrinking of space for public participation. This study employs a methodology comprising heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, further deepened through causal-contextual analysis. The findings indicate that the collapse of Guided Democracy cannot be adequately explained solely by the personalization of power under President Sukarno. Instead, the process was shaped by the interplay of five mechanisms: the expansion of executive power, institutional erosion, elite polarization, the military's

expanding political role, and the control of media and public space. Based on this pattern, the relationship among the three primary mechanisms—executive dominance, elite polarization, and institutional weakness—is conceptualized as a "Triadic Breakdown Mechanism." This mechanism reveals a feedback loop: the concentration of power deepens political polarization; polarization diminishes the capacity of institutions to constrain power; and institutional weakening, in turn, creates greater scope for executive expansion. Thus, Guided Democracy can be understood as a trajectory of democratic decline that gradually evolved into a full democratic collapse. This perspective broadens the historiography of Indonesian politics by situating the experience of Guided Democracy within the wider discourse on autocratization and the erosion of democratic institutions

Keywords: *Guided Democracy; democratic breakdown; democratic backsliding; executive aggrandizement; elite polarization; institutional erosion; Indonesia.*

PENDAHULUAN

Demokrasi tidak bertahan secara otomatis, melainkan bergantung pada interaksi antara institusi formal, norma demokrasi, serta aktor politik dan sosial yang membatasi penggunaan kekuasaan. Pemilu, parlemen, konstitusi, dan lembaga peradilan membentuk kerangka formal demokrasi, tetapi keberadaannya tidak menjamin demokrasi tetap berjalan ketika otonomi institusional dan mekanisme pengawasan melemah. Kemunduran demokrasi umumnya berlangsung secara gradual melalui pelemahan *democratic guardrails*, perubahan fungsi institusi, dan erosi norma akuntabilitas politik (Druckman, 2023; Grillo et al., 2024; Jee et al., 2021). Akibatnya, sistem poli(Frantz et al., 2025) dapat tetap mempertahankan bentuk-bentuk demokratis secara formal, tetapi mengalami penurunan kualitas ketika institusinya semakin tidak mampu mengawasi dan membatasi kekuasaan (Kaufman et al., 2025). Proses ini menjadi perhatian dalam kajian *democratic backsliding*, *democratic erosion*, dan pada tahap lanjut *autocratization* (*Conceptualizing and Measuring*

Autocratization Episodes, 2021; Druckman, 2023)

Frantz et al. menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi dapat terbentuk dari hubungan timbal balik antara polarisasi politik dan semakin terkonsentrasinya kekuasaan eksekutif yang melemahkan batas-batas kelembagaan (Frantz et al., 2025). Pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan proses yang dinamis, sehingga fondasi institusionalnya dapat terkikis secara bertahap. Dalam konteks tersebut, *democratic breakdown* tidak selalu terjadi melalui satu peristiwa yang secara langsung mengakhiri demokrasi, tetapi dapat muncul dari akumulasi perubahan politik dan kelembagaan yang perlahan mengurangi kemampuan institusi untuk mengawasi, membatasi, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan.

Bagi Schäfer & Syam (2025) Krisis politik dapat mempercepat pelemahan demokrasi dengan membuka ruang bagi perluasan kewenangan eksekutif, terutama ketika kapasitas pengawasan legislatif dan yudisial terbatas (Article, 2025). Namun, krisis tidak dengan sendirinya menyebabkan regresi demokratis karena dampaknya bergantung pada kekuatan

kelembagaan dalam mengendalikan penggunaan kewenangan luar biasa. Jika perluasan kekuasaan berlangsung berulang tanpa mekanisme koreksi yang efektif, kebijakan yang semula bersifat sementara dapat bertransformasi menjadi pengaturan kelembagaan yang lebih permanen.

Perspektif ini relevan untuk membaca pengalaman demokrasi Indonesia dalam konteks historis maupun kontemporer. Berdasarkan indikator *Varieties of Democracy* (V-Dem), Febriandy dan Wahid (2023) menunjukkan adanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi dan kualitas elektoral, disertai menguatnya pengaruh eksekutif terhadap institusi negara lainnya. Temuan tersebut tidak menempatkan Indonesia kontemporer setara dengan masa Demokrasi Terpimpin, tetapi menunjukkan bahwa isu distribusi kekuasaan, akuntabilitas politik, dan kapasitas institusi tetap penting dalam memahami ketahanan demokrasi. Literatur tentang demokrasi Indonesia kontemporer umumnya berfokus pada periode pasca-Reformasi setelah 1998 (Aspinall et al., 2020; Baidhowah, 2021; Eka et al., 2023; Nuraniyah, 2020; Rumesten & Adisti, 2022; Sejarah & Humaniora, 2024; Yusoff & Borz, 2023), sedangkan Demokrasi Terpimpin lebih banyak dibahas melalui sejarah politik, kemunduran Demokrasi Parlementer, konflik ideologis, personalisasi kepemimpinan Soekarno, dan relasi sipil-militer. Meskipun perspektif tersebut penting, masih terdapat ruang untuk mempertemukan kajian Demokrasi Terpimpin dengan literatur komparatif tentang *democratic backsliding* dan *democratic breakdown* (Grillo et al., 2024; Kasuya & Tan, 2024; Prayogi & Nasrullah, n.d.)

Kesenjangan tersebut penting karena Demokrasi Terpimpin menandai rekonfigurasi mendasar terhadap institusi demokrasi formal di Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri kebuntuan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, diikuti oleh reorganisasi kelembagaan, pembentukan DPR-GR, penguatan kewenangan Presiden, perluasan peran politik militer, serta pembatasan media dan ruang publik. Rangkaian perubahan ini tidak hanya memengaruhi struktur kelembagaan, tetapi juga mengubah pola penggunaan dan pengendalian kekuasaan politik. Oleh karena itu, persoalan analitisnya bukan semata-mata apakah Demokrasi Terpimpin dapat dikategorikan demokratis atau otoriter, melainkan bagaimana perubahan tersebut berlangsung dan melalui mekanisme apa kapasitas institusi demokratis untuk mengawasi serta membatasi kekuasaan secara bertahap melemah.

Konsep *executive aggrandizement* membantu menjelaskan bagaimana konsentrasi kekuasaan dapat berkembang tanpa harus menghapus institusi demokrasi secara langsung. Proses ini dapat berlangsung melalui perubahan hukum, pengaturan kelembagaan, dan modifikasi aturan politik yang secara formal masih mempertahankan sebagian struktur demokrasi. Dalam kondisi tersebut, *checks and balances* dapat melemah secara bertahap ketika perubahan institusional semakin memperluas ruang gerak dan efektivitas kewenangan eksekutif. Pemikiran Marcus Mietzner (Mietzner, 2025), Antonio Benasaglio Berlucchi (Berlucchi et al., 2023), Natasha Wunsch (Wunsch et al., 2023), dan Joep van Lit (Lit

et al., 2024) menjadi landasan penting untuk memahami proses ekspansi kewenangan tersebut dan dampaknya terhadap efektivitas praktis *checks and balances*.

Trajektori Demokrasi Terpimpin juga berkaitan erat dengan meningkatnya polarisasi elite. Sejak 1950-an, perbedaan politik semakin berkembang menjadi persaingan ideologis antara kekuatan nasionalis, Islam, dan komunis, sementara militer mulai memperoleh posisi yang semakin penting dalam arena politik. Barton, Pramestuti menunjukkan bahwa fragmentasi tersebut merupakan unsur penting dalam memahami dinamika politik Indonesia pada periode tersebut. Ketika polarisasi semakin tajam, ruang kompromi politik menyempit dan tuntutan terhadap kepemimpinan eksekutif yang kuat memperoleh legitimasi lebih besar sebagai instrumen untuk mengendalikan konflik antarkelompok (Barton & Yilmaz, 2021; Kunci, 2023; Pramestuti et al., 2022).

Kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi melalui pelemahan institusi negara, tetapi juga melalui berkurangnya kapasitas masyarakat dalam mengawasi kekuasaan. Pembatasan terhadap masyarakat sipil, media independen, dan oposisi politik dapat melemahkan akuntabilitas vertikal sekaligus mempersempit ruang kritik dan deliberasi publik. Dalam konteks ini, kebebasan informasi menjadi unsur penting dalam menjaga pengawasan demokratis. Kajian Andi Sebastian serta Alexandra Schwinges; Václav Štětka; Timothy Besley; dan Erin C. Carroll menegaskan pentingnya akses informasi dan kebebasan media dalam membangun akuntabilitas publik yang efektif (Besley et al., 2005; Carroll & Carroll, 2024; Journal, 2025; Schwinges et

al., 2025; Václav Štětka *Watchdogs That Only Bark FINAL ACCEPTED.Pdf*, n.d.)

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini berfokus pada tiga pertanyaan utama: **(1)** kondisi struktural dan kelembagaan apa yang mendorong kegagalan Demokrasi Terpimpin; **(2)** bagaimana pengalaman Demokrasi Terpimpin dapat dipahami kembali melalui perspektif *democratic breakdown*; dan **(3)** bagaimana dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional saling berinteraksi dalam membentuk proses kemunduran demokrasi.

Artikel ini berargumen bahwa kegagalan Demokrasi Terpimpin tidak cukup dijelaskan oleh personalisasi kekuasaan Presiden Soekarno, tetapi perlu dipahami sebagai proses sistemik yang melibatkan konsentrasi kekuasaan eksekutif, polarisasi elite, erosi pengawasan institusional, perluasan peran politik militer, dan penyempitan ruang publik. Atas dasar itu, artikel ini mengembangkan *Triadic Breakdown Mechanism*, yang menempatkan dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional sebagai tiga mekanisme yang saling memperkuat. Dominasi eksekutif memperdalam polarisasi, polarisasi mengikis kapasitas institusional, dan pelemahan institusi kembali membuka ruang bagi ekspansi kekuasaan eksekutif. Siklus tersebut menunjukkan bagaimana erosi demokrasi dapat berlangsung secara bertahap hingga berkembang menjadi *democratic breakdown*, sekaligus menghubungkan pengalaman Demokrasi Terpimpin dengan kajian komparatif tentang *democratic backsliding*, *executive aggrandizement*, dan *autocratization*.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Riset

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan orientasi historis komparatif untuk merekonstruksi dan menjelaskan transformasi politik Indonesia selama Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Analisis tidak hanya menelusuri kronologi, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara aktor, institusi, struktur kekuasaan, dan perubahan kelembagaan serta implikasinya terhadap kapasitas institusi demokratis dalam membatasi kekuasaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan konteks politik, tujuan, posisi penulis, dan kepentingan yang melatarbelakangi produksi setiap sumber sejarah. Proses penelitian mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menghasilkan penjelasan kausal-kontekstual (Studies, 2020; Yogatama, 2018).

Heuristik dan Kritik Sumber

Tahap heuristik dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghimpun sumber primer serta sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dokumen konstitusional dan MPRS, pidato Presiden Soekarno, dokumen DPR-GR, arsip pemerintah, serta media sezaman. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel ilmiah, buku akademik, kajian sejarah politik Indonesia, dan literatur mengenai *democratic backsliding*. Sumber dipilih berdasarkan relevansinya dengan perubahan distribusi kekuasaan, fungsi pengawasan institusional, polarisasi elite, peran militer, kontrol media, dan perubahan ruang publik (Studies, 2020).

Kritik sumber dilakukan melalui kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal digunakan untuk memeriksa asal-usul, tanggal, otoritas penerbit, dan keaslian dokumen, sedangkan kritik internal menilai isi, konsistensi, tujuan politik, penggunaan bahasa legitimasi, serta potensi bias sumber. Mengingat dokumen politik tidak selalu mencerminkan realitas secara netral, informasi dari pidato, dokumen institusional, arsip media, dan sumber lainnya dibandingkan untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, serta kemungkinan distorsi (Yogatama, 2018).

Interpretasi dan Triangulasi

Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan bukti yang telah diverifikasi dengan konsep *democratic backsliding*, *executive aggrandizement*, *elite polarization*, *institutional erosion*, *hybrid regime*, dan *autocratization*. Konsep-konsep tersebut digunakan sebagai perangkat analitis untuk membaca proses historis tanpa menerapkan kategori kontemporer secara retrospektif, sehingga konteks Indonesia tetap menjadi dasar interpretasi. Analisis kausal-kontekstual menempatkan Dekrit 5 Juli 1959 sebagai titik balik yang mengubah konfigurasi kelembagaan, kemudian menelusuri keterkaitan antara pembentukan DPR-GR, perluasan kewenangan eksekutif, meningkatnya peran politik militer, dan kontrol media dalam membentuk perubahan kapasitas demokratis secara kumulatif. Untuk memperkuat interpretasi, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dokumen negara, pidato politik, catatan institusional, arsip media, dan literatur ilmiah sehingga analisis tidak bergantung pada satu jenis bukti (Studies, 2020).

Historiografi

Historiografi disusun untuk menghasilkan penjelasan analitis, bukan sekadar rangkaian kronologis, dengan memadukan bukti dan interpretasi ke dalam narasi sejarah yang koheren. Tahap ini mengaitkan dinamika politik Indonesia dengan perspektif komparatif tentang demokrasi, sehingga transformasi Demokrasi Terpimpin dapat dipahami secara kontekstual dalam lintasan sejarah sekaligus ditempatkan dalam kerangka analitis yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Kondisi Struktural dan Kelembagaan yang Mendorong Kegagalan Demokrasi Terpimpin

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan Demokrasi Terpimpin bukan merupakan konsekuensi langsung dari satu aktor atau peristiwa politik, tetapi terbentuk melalui perubahan struktural dan kelembagaan yang secara bertahap menggeser distribusi serta mekanisme pengendalian kekuasaan. Proses tersebut berlangsung melalui lima mekanisme utama: (1) perluasan kewenangan eksekutif melalui *executive aggrandizement*; (2) erosi kendala kelembagaan yang melemahkan akuntabilitas horizontal; (3) meningkatnya fragmentasi dan polarisasi elite; (4) meluasnya peran politik militer; dan (5) menguatnya kontrol negara atas media dan ruang publik. Kelima mekanisme ini saling berkaitan dan tidak bekerja secara independen. Perubahan dalam satu ranah dapat memperkuat perubahan pada ranah lainnya, sehingga secara kumulatif mengurangi kemampuan sistem politik untuk membatasi, mengawasi, dan mengoreksi penggunaan kekuasaan.

Konsentrasi Kekuasaan Eksekutif

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi titik balik penting dalam perubahan tatanan konstitusional Indonesia. Berdasarkan catatan Arsip Nasional Republik Indonesia, dekrit tersebut membubarkan Majelis Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan mengakhiri keberlakuan UUDS 1950 (Arsip Nasional Republik Indonesia, Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959) (Tertinggi et al., 1945). Keputusan tersebut muncul di tengah krisis politik dan kebuntuan konstitusional yang berkepanjangan, sehingga pada tahap awal dapat dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketidakmampuan sistem parlementer mencapai kesepakatan konstitusional. Namun, dampaknya tidak berhenti pada penyelesaian kebuntuan tersebut. Dekrit justru menjadi dasar bagi perubahan yang lebih luas dalam konfigurasi kelembagaan dan distribusi otoritas politik di Indonesia.

Pemberlakuan kembali UUD 1945 memperkuat kedudukan Presiden dalam sistem politik yang sebelumnya menempatkan pemerintahan dalam ketergantungan yang lebih besar pada dukungan parlemen. Perubahan tersebut memperluas ruang bagi Presiden untuk mengarahkan jalannya pemerintahan sekaligus menata kembali hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan. Selanjutnya, restrukturisasi institusi politik dan penggunaan legitimasi ideologis melalui Manipol-USDEK memungkinkan perluasan kewenangan berlangsung dalam kerangka kelembagaan yang secara formal tetap dipertahankan. Dengan demikian, konsentrasi kekuasaan tidak selalu dimulai dengan pembubaran institusi demokratis,

tetapi dapat berkembang melalui perubahan fungsi, komposisi, dan relasi antarlembaga.

Pola tersebut tercermin dalam pidato Soekarno, *Rediscovery of Our Revolution*, pada 17 Agustus 1959 dan Dekrit MPRS Nomor I/MPRS/1960 (SUKARNO *PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA.Pdf*, n.d.). Revolusi dipahami sebagai proses yang masih berjalan dan belum mencapai tujuan akhirnya, sehingga kebutuhan akan kepemimpinan politik yang kuat memperoleh legitimasi dalam kerangka pencapaian agenda revolusioner. Dalam kerangka tersebut, NASAKOM dikembangkan untuk mengintegrasikan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis di bawah kepemimpinan Presiden (Soekarno, *Rediscovery of Our Revolution*, 1959; Dekrit MPRS Nomor I/MPRS/1960) (Permasyarakatan & Sementara, 1960). Konsekuensinya, basis legitimasi politik secara bertahap bergeser dari representasi elektoral menuju klaim atas kapasitas historis Presiden dalam menjaga persatuan nasional dan mengarahkan jalannya revolusi.

Dalam perspektif politik komparatif, perkembangan tersebut menunjukkan kemiripan dengan mekanisme *executive aggrandizement* yang dibahas oleh Marcus Mietzner, Antonio Benasaglio Berlucchi, Natasha Wunsch, dan Joep van Lit. Namun, pengalaman Indonesia berkembang dalam konteks historis yang berbeda. Perluasan kewenangan eksekutif tidak semata-mata didorong oleh upaya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga oleh pertemuan antara krisis parlementer, ideologi revolusioner, persaingan elite, kebutuhan akan stabilitas politik, dan pembentukan koalisi pendukung negara. Oleh karena itu, konsentrasi kekuasaan pada masa

Demokrasi Terpimpin lebih tepat dilihat sebagai proses institusional yang terbentuk secara bertahap dari konfigurasi krisis dan dinamika persaingan politik pada masa tersebut.

Pelemahan Legislatif dan Yudikatif

Perubahan relasi antara eksekutif dan legislatif semakin nyata setelah pembentukan DPR-GR. Pembubaran parlemen hasil Pemilu 1955 dan pembentukannya kembali melalui DPR-GR mengubah dasar representasi politik karena keanggotaan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada mandat elektoral, tetapi juga pada mekanisme pengangkatan. Perubahan tersebut membatasi otonomi parlemen terhadap Presiden dan sekaligus mengurangi efektivitas fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif seperti terlihat dalam Tata Tertib DPR-GR (*No Title*, 1960), Inoue, (2013) (Yes, n.d.).

Perubahan tersebut memiliki konsekuensi penting karena parlemen tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga menjadi ruang representasi kepentingan publik dan pengawasan terhadap pemerintah. Pergeseran basis representasi yang disertai meningkatnya ketergantungan pada eksekutif semakin membatasi efektivitas *checks and balances*. Pelemahan serupa juga terjadi pada ranah yudisial. Kewenangan konstitusional peradilan untuk menguji dan membatasi legislasi maupun tindakan eksekutif masih terbatas, sehingga pengadilan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi penyeimbang yang efektif terhadap perluasan kekuasaan pemerintah.

Dari perspektif kelembagaan, kondisi tersebut menunjukkan melemahnya akuntabilitas horizontal, yaitu kemampuan lembaga negara untuk saling mengawasi,

membatasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan politik. Berkurangnya independensi parlemen dan terbatasnya kapasitas yudisial secara bersamaan memperlemah kendala institusional terhadap eksekutif (Haven & Hall, 2015). Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi demokratis secara formal belum cukup untuk menjamin keberlanjutan demokrasi. Demokrasi juga bergantung pada distribusi kewenangan yang memungkinkan setiap lembaga menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi terhadap konsentrasi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Fragmentasi dan Polarisasi Elite

Krisis Demokrasi Parlementer menjelang 1959 berkembang di tengah fragmentasi elite politik yang semakin kuat. PNI, Masyumi, NU, dan PKI membawa orientasi nasionalis, Islam, dan komunis yang berbeda, tidak hanya dalam pilihan politik, tetapi juga dalam memahami dasar negara, relasi agama dan politik, sistem ekonomi, serta arah revolusi (Ibrahim, 2023; Pramestuti et al., 2022). Namun, fragmentasi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kegagalan demokrasi. Dalam sistem demokratis yang berjalan efektif, perbedaan kepentingan tetap dapat dikelola melalui negosiasi, pembentukan koalisi, kompromi, dan mekanisme representasi yang tersedia.

Persoalan mulai muncul ketika fragmentasi berubah menjadi polarisasi, sehingga kelompok-kelompok politik yang berseberangan memandang satu sama lain sebagai ancaman terhadap kepentingan dan identitas politik mereka. Kebuntuan Majelis Konstituante menjadi salah satu gambaran nyata dari terbatasnya kapasitas kompromi

tersebut (Ibrahim, 2023; Susanto et al., 2023). Kegagalan mencapai kesepakatan mengenai dasar konstitusional, yang berlangsung bersamaan dengan pergantian kabinet secara berulang, semakin memperkuat pandangan bahwa sistem parlementer tidak mampu menyediakan stabilitas maupun menghasilkan keputusan politik yang berkelanjutan (Adiputri, 2018; Fajri et al., 2025).

Kondisi tersebut membuka ruang legitimasi bagi tuntutan akan kepemimpinan eksekutif yang lebih kuat. Polarisasi elite dan konsentrasi kekuasaan kemudian berkembang dalam hubungan yang saling memperkuat: konflik politik yang semakin tajam mendorong tuntutan terhadap stabilitas dan kepemimpinan yang kuat, sementara pemusatan kekuasaan mengubah distribusi akses, sumber daya, dan pengaruh politik yang pada gilirannya dapat memperuncing persaingan antarkelompok. Dengan demikian, polarisasi tidak hanya menjadi konteks perubahan kelembagaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme politik yang berinteraksi langsung dengan proses perluasan kekuasaan eksekutif.

Perluasan Peran Politik Militer

Transformasi hubungan sipil–militer merupakan bagian penting dari perubahan politik selama Demokrasi Terpimpin. Pada akhir 1950-an, gagasan *Jalan Tengah* yang dikembangkan A.H. Nasution memberikan dasar pemikiran bagi penerimaan keterlibatan militer dalam urusan nasional tanpa harus mengambil alih pemerintahan secara langsung. Meskipun *Dwifungsi ABRI* baru memperoleh pelembagaan formal pada masa Orde Baru, keterlibatan militer dalam politik telah berkembang selama Demokrasi

Terpimpin dan menjadi salah satu landasan bagi institusionalisasi peran politik militer pada periode berikutnya (Azwar et al., 1998; Mubarak & Puspita, 2022; Rahman, 2020). Perluasan peran tersebut berkembang di tengah krisis keamanan, konflik regional, dan menguatnya tuntutan terhadap stabilitas politik. Penempatan perwira aktif dalam posisi strategis pemerintahan serta keterlibatan militer dalam pengambilan keputusan politik secara bertahap mempersempit batas antara ranah sipil dan militer (Inpantri et al., 2022).

Dalam perspektif hubungan sipil–militer, perkembangan ini menunjukkan melemahnya prinsip supremasi sipil, ketika kapasitas koersif militer mulai berjalan beriringan dengan pengaruh politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Relasi antara Presiden dan militer, bagaimanapun, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan subordinatif. Militer juga memiliki kepentingan institusional dan agenda organisasional yang memengaruhi posisinya dalam politik. Seiring meningkatnya keterlibatan militer, distribusi kekuasaan pun bergeser: ruang bagi oposisi sipil menyempit, sementara pengaruh aktor yang legitimasi utamanya tidak berasal dari representasi elektoral semakin besar. Dalam konteks tersebut, ekspansi politik militer menjadi bagian dari perubahan kelembagaan yang turut mendorong terbentuknya karakter rezim yang semakin hibrida (Hati et al., 2022; Teo, 2022).

Kontrol Media, Ruang Publik, dan Masyarakat Sipil

Kebebasan media merupakan salah satu fondasi akuntabilitas demokratis

karena memungkinkan tersedianya informasi yang independen, membuka ruang bagi kritik terhadap pemerintah, dan membantu warga menilai bagaimana kekuasaan dijalankan. Dalam Demokrasi Terpimpin, media yang dinilai mengganggu stabilitas atau tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah semakin berada di bawah pengawasan dan pembatasan. Praktik tersebut mencakup pencabutan izin penerbitan serta intervensi terhadap proses produksi dan distribusi informasi (Journal, 2025).

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kebebasan pers, tetapi juga pada kapasitas publik untuk mengawasi pemerintah. Ketika media kehilangan fungsi pengawasnya, akses warga terhadap informasi alternatif yang diperlukan untuk menilai dan mengkritisi penggunaan kekuasaan ikut menyempit. Alexandra Schwinges, Václav Štětka, Timothy Besley, dan Erin C. Carroll menegaskan pentingnya media bagi transparansi, pengawasan publik, dan akuntabilitas institusional (Schwinges et al., 2025) (*Václav Štětka Watchdogs That Only Bark FINAL ACCEPTED.Pdf*, n.d.) (Besley et al., 2005) (Carroll & Carroll, 2024). Dalam Demokrasi Terpimpin, pengaturan informasi juga terkait dengan upaya membangun legitimasi revolusioner, sehingga media semakin diarahkan untuk mendukung agenda politik negara. Kondisi tersebut pada akhirnya mempersempit ruang bagi perdebatan publik yang independen.

Pembatasan tersebut turut melemahkan otonomi masyarakat sipil. Organisasi pemuda, buruh, profesi, dan kelompok sosial lainnya tetap menjalankan aktivitasnya, tetapi ruang untuk bertindak

secara independen semakin menyempit karena keterikatannya dengan struktur politik dan konfigurasi NASAKOM (Hidayat et al., 2022; Smidt et al., 2025).

Perubahan ini, dengan demikian, lebih tepat dipahami sebagai erosi otonomi dan kapasitas pengawasan masyarakat sipil daripada sebagai hilangnya masyarakat sipil itu sendiri (Djindan & Harjanto, 2021). Wiratraman, H.P. menekankan bahwa kebebasan berekspresi dan keterbukaan ruang publik merupakan prasyarat penting bagi akuntabilitas demokratis. Ketika kontrol negara terhadap informasi menguat dan organisasi sosial semakin terintegrasi ke dalam struktur politik, kemampuan masyarakat untuk menjalankan akuntabilitas vertikal terhadap pemerintah ikut melemah (Wiratraman & Mada, 2025).

Demokrasi Terpimpin dalam Perspektif *Democratic Breakdown*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman Demokrasi Terpimpin lebih tepat dipahami sebagai proses kemunduran demokrasi yang berlangsung secara bertahap hingga mencapai *democratic breakdown*, bukan sebagai keruntuhan institusional yang terjadi secara mendadak (Grillo et al., 2024). Lima mekanisme yang teridentifikasi, konsentrasi kekuasaan eksekutif, erosi institusional, polarisasi elite, perluasan peran politik militer, serta pengendalian media dan ruang publik saling berinteraksi membentuk proses kumulatif yang secara perlahan melemahkan kapasitas demokratis sistem politik.

Perspektif *democratic breakdown* mengalihkan perhatian dari persoalan tentang siapa yang menyebabkan keruntuhan demokrasi menuju bagaimana

kondisi dan mekanisme tertentu memungkinkan proses tersebut berkembang (Berlucchi et al., 2023; Wolkenstein, 2023). Dalam konteks Demokrasi Terpimpin, institusi demokratis tidak serta-merta dihapuskan. Partai politik tetap beroperasi, lembaga perwakilan tetap berada dalam struktur negara, dan konstitusi tetap digunakan sebagai sumber legitimasi. Perubahan yang lebih mendasar terjadi pada fungsi, otonomi, dan kapasitas substantif institusi-institusi tersebut (Hidayat et al., 2022; Nurjaman et al., 2022). Dengan demikian, kemunduran demokrasi berlangsung melalui semakin lebarnya jarak antara keberadaan formal institusi dan kemampuan aktualnya untuk membatasi kekuasaan.

DPR-GR memberikan ilustrasi yang jelas mengenai pola tersebut. Parlemen tetap dipertahankan secara formal, tetapi basis representasinya berbeda dari DPR hasil Pemilu 1955 dan relasinya dengan Presiden semakin subordinatif (Konstitusionalitas & Presiden, 2021). Pola serupa terlihat dalam kehidupan pers. Organisasi media tetap beroperasi, tetapi kemampuannya untuk menyampaikan kritik dan menjalankan pengawasan secara independen semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa regresi demokrasi tidak selalu berlangsung melalui penghapusan institusi, tetapi dapat terjadi melalui perubahan internal yang secara bertahap mengurangi fungsi dan otonomi institusi yang tetap dipertahankan secara formal.

Dalam perspektif ini, Demokrasi Terpimpin dapat dipandang sebagai fase transisi menuju konfigurasi rezim yang semakin hibrida. Institusi dan prosedur demokratis tetap dipertahankan sebagai

sumber legitimasi formal, tetapi efektivitasnya semakin tereduksi oleh dominasi eksekutif, terbatasnya kompetisi politik, meluasnya peran militer, dan menyempitnya ruang publik. Transformasi tersebut tidak terjadi melalui satu keputusan yang secara langsung menghapus seluruh institusi demokrasi, melainkan melalui perubahan bertahap dalam distribusi otoritas dan kapasitas institusional.

Pengalaman Demokrasi Terpimpin menunjukkan sejumlah karakter yang sejalan dengan kajian kontemporer tentang autokratisasi, terutama melalui konsentrasi kekuasaan eksekutif, pelemahan *checks and balances*, pembatasan media, perluasan peran politik militer, dan penggunaan legitimasi ideologis (Grillo et al., 2024). Mekanisme tersebut memiliki titik temu dengan pola kemunduran demokrasi yang terjadi dalam konteks lain. Namun, konsep *autocratization* perlu diterapkan secara kontekstual. Demokrasi Terpimpin berkembang dalam situasi pascakolonial yang diwarnai persoalan pembentukan negara, konflik ideologis, ketegangan pusat-daerah, dan keyakinan bahwa revolusi nasional belum mencapai tujuan akhirnya. Karena itu, konsep komparatif tersebut lebih tepat digunakan sebagai perangkat analitis untuk memperluas pemahaman atas pengalaman Indonesia tanpa mengabaikan (Dan & Politik, 2025; Quah, 2026; Wolkenstein, 2023).

Dari perspektif ini, kegagalan Demokrasi Terpimpin menunjukkan adanya paradoks institusional. Sentralisasi kekuasaan memang dapat mempercepat pengambilan dan pelaksanaan keputusan, tetapi efektivitas administratif tidak serta-merta menghasilkan ketahanan demokratis. Ketika efektivitas tersebut dicapai dengan

mengurangi otonomi lembaga pengawas, sistem kehilangan kemampuan untuk mendeteksi kesalahan, mengoreksi kebijakan, dan menyelesaikan konflik melalui mekanisme kelembagaan. Dengan demikian, stabilitas yang dibangun melalui konsentrasi kekuasaan pada saat yang sama dapat menciptakan kerentanan baru terhadap krisis demokrasi.

Interaksi Dominasi Eksekutif, Polarisasi Elite, dan Kelemahan Institusional

Sintesis temuan menunjukkan bahwa tiga mekanisme utama menjelaskan dinamika tersebut, yaitu dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional. Ketiganya tidak berlangsung secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam hubungan yang rekursif, sehingga penguatan satu mekanisme dapat mendorong dan sekaligus memperkuat mekanisme lainnya.

Pertama, dominasi eksekutif menggeser distribusi akses dan pengaruh dalam arena politik. Ketika Presiden menjadi pusat utama pengambilan keputusan, elite politik terdorong untuk membangun kedekatan dengan pusat kekuasaan. Akibatnya, kompetisi politik dapat bergeser dari perdebatan mengenai kebijakan menuju persaingan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya, otoritas, dan legitimasi eksekutif. Pada saat yang sama, konsentrasi kekuasaan tersebut meningkatkan ketergantungan institusi politik terhadap pusat kekuasaan (Mietzner, 2025).

Kedua, polarisasi elite melemahkan kapasitas sistem politik untuk mencapai kompromi. Ketika perbedaan ideologis semakin tajam, kelompok-kelompok politik cenderung memandang persaingan sebagai

permainan *zero-sum*, di mana keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian pihak lain. Dalam kondisi demikian, prosedur kelembagaan yang semestinya menjadi ruang kompromi dapat kehilangan legitimasi, sementara tindakan eksekutif yang melampaui prosedur yang berlaku lebih mudah diterima sebagai jalan keluar dari kebuntuan atau sebagai upaya menjaga stabilitas. Dengan demikian, polarisasi elite menciptakan kondisi politik yang semakin kondusif bagi konsentrasi kekuasaan (Rivera-Escartin, 2024).

Ketiga, kelemahan institusional membatasi kemampuan sistem politik untuk mengoreksi dan mengendalikan konsentrasi kekuasaan. Ketika parlemen dan peradilan tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, perluasan kewenangan eksekutif semakin sulit dibatasi. Kondisi ini kemudian membentuk mekanisme umpan balik yang saling memperkuat, di mana dominasi eksekutif memperdalam polarisasi elite, polarisasi melemahkan kapasitas institusional, dan kelemahan institusional pada gilirannya membuka ruang bagi penguatan kembali dominasi eksekutif.

Dominasi Eksekutif → Polarisasi Elite → Kelemahan Institusional → Dominasi Eksekutif

Model tersebut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan kausal yang bersifat linear. Setiap panah merepresentasikan hubungan yang dinamis, simultan, dan timbal balik. Dominasi eksekutif dapat memperkuat polarisasi, polarisasi dapat semakin melemahkan institusi, sementara kelemahan institusional membuka ruang yang lebih besar bagi eksekutif untuk memperluas kekuasaannya.

Pola interaksi ini dikonsepsikan sebagai *Triadic Breakdown Mechanism*, sebuah mekanisme kontekstual yang dirumuskan dari pengalaman historis Indonesia pada 1959–1965, bukan sebagai hukum universal yang berlaku bagi seluruh kasus keruntuhan demokrasi.

Interaksi triadik tersebut juga menunjukkan bagaimana dua mekanisme lainnya, yaitu peran politik militer serta kontrol media dan ruang publik, turut memperkuat proses yang sama. Militer menyediakan kapasitas koersif dan sumber daya organisasi yang memperluas struktur kekuasaan di luar jalur representasi elektoral. Sebaliknya, kontrol media dan penyempitan ruang publik mengurangi kemampuan masyarakat untuk memberikan tekanan politik dan menjalankan akuntabilitas vertikal. Masyarakat sipil tetap bertahan, tetapi ruang otonominya semakin terbatas. Dengan demikian, kelima mekanisme tersebut saling berkelindan dalam membentuk kondisi yang memungkinkan dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional berkembang secara kumulatif dan saling memperkuat.

Model *Guided Democracy Democratic Breakdown Model* (GDDBM)

Berdasarkan sintesis temuan, penelitian ini mengembangkan *Guided Democracy Democratic Breakdown Model* (GDDBM) sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan proses keruntuhan demokrasi selama Demokrasi Terpimpin. Model ini mengintegrasikan lima mekanisme empiris ke dalam tiga mekanisme inti yang saling berinteraksi dalam suatu proses bertingkat. Lapisan pertama: kondisi struktural. Proses tersebut berawal dari krisis Demokrasi

Parlementer, kebuntuan Majelis Konstituante, fragmentasi elite, konflik keamanan dan regional, serta meningkatnya tuntutan akan stabilitas. Akumulasi kondisi ini menciptakan lingkungan politik yang semakin rentan terhadap perubahan dan transformasi kelembagaan demokratis.

Lapisan kedua: transformasi kelembagaan. Dekrit 5 Juli 1959 menandai perubahan mendasar dalam kerangka konstitusional yang sekaligus memperkuat posisi Presiden. Perubahan ini diikuti pembentukan DPR-GR dan terbatasnya kemampuan yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bersamaan dengan itu, meningkatnya keterlibatan militer dalam politik turut menggeser keseimbangan otoritas antara institusi sipil dan aktor koersif.

Lapisan ketiga: penyempitan ruang sosial. Pengendalian media, pembatasan kebebasan berekspresi, dan semakin terbatasnya otonomi masyarakat sipil mempersempit ruang partisipasi publik. Kondisi tersebut sekaligus mengurangi kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan menyuarakan kritik terhadap penggunaan kekuasaan.

Lapisan keempat: mekanisme triadik. Dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional saling berinteraksi dalam suatu mekanisme umpan balik yang memperkuat satu sama lain. Lapisan ini menjadi inti GDDBM karena menjelaskan bagaimana tekanan struktural dan perubahan kelembagaan selanjutnya berkembang menjadi proses yang mempertahankan dan memperluas konsentrasi kekuasaan.

Lapisan kelima: transformasi rezim. Akumulasi proses tersebut mendorong pergeseran dari demokrasi konstitusional

menuju konfigurasi rezim yang semakin hibrida dan bercorak otoriter. Transformasi ini tidak terutama berlangsung melalui penghapusan institusi demokratis, melainkan melalui pelemahan kapasitas substantifnya dalam menjalankan fungsi pembatasan terhadap kekuasaan.

Dengan demikian, GDDBM menjelaskan keruntuhan demokrasi melalui beberapa tingkat analisis yang saling terhubung. Kondisi struktural membentuk konteks awal, institusi menentukan arena dan batas kompetisi, elite merespons melalui strategi politik, sedangkan militer menghadirkan dimensi koersif. Pada saat yang sama, media dan masyarakat sipil turut menentukan kapasitas akuntabilitas publik. Interaksi dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional kemudian membentuk proses rekursif yang semakin mempercepat erosi demokrasi. Dengan perspektif tersebut, GDDBM menawarkan penjelasan yang lebih sistemik dibandingkan interpretasi yang menempatkan personalisasi kekuasaan Soekarno sebagai penjelasan utama atau tunggal atas perubahan politik selama Demokrasi Terpimpin.

Mengapa Demokrasi Terpimpin Gagal?

Kegagalan Demokrasi Terpimpin tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai konsekuensi dari upaya menggantikan Demokrasi Parlementer yang dinilai tidak stabil. Memang, Demokrasi Parlementer menghadapi fragmentasi partai, pergantian kabinet, konflik ideologis, dan kebuntuan Majelis Konstituante. Namun, perubahan kelembagaan setelah 1959 tidak berhasil membangun keseimbangan kekuasaan yang berkelanjutan. Sebaliknya, semakin terkonsentrasinya otoritas pada eksekutif secara bertahap melemahkan kapasitas

institusi lain untuk menjalankan fungsi pengawasan, pembatasan, dan koreksi terhadap kekuasaan.

Dalam jangka pendek, sentralisasi dapat mempercepat pengambilan keputusan, tetapi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan tidak selalu berarti ketahanan demokratis. Ketika stabilitas dibangun dengan mengurangi otonomi lembaga pengawas, kemampuan sistem untuk mengoreksi kebijakan dan menyelesaikan konflik melalui jalur kelembagaan ikut melemah. Persoalan ini semakin kompleks ketika polarisasi elite menggeser persaingan politik menjadi perebutan akses terhadap pusat kekuasaan. NASAKOM memang menyediakan kerangka untuk mengakomodasi berbagai kekuatan politik, tetapi ketergantungannya pada kepemimpinan Presiden membuat integrasi tersebut belum sepenuhnya mampu meredam kompetisi ideologis.

Pada saat yang sama, meningkatnya peran politik militer, pembatasan media, serta menyempitnya ruang publik dan otonomi masyarakat sipil semakin mengurangi mekanisme institusional maupun sosial yang dapat membatasi konsentrasi kekuasaan. Dalam konteks tersebut, kegagalan Demokrasi Terpimpin dapat dipahami sebagai hasil kumulatif dari ketegangan antara tuntutan stabilitas dan kebutuhan mempertahankan pembatasan kekuasaan. Ketika mekanisme pembatas tersebut terus melemah, stabilitas yang semula diharapkan justru membentuk konfigurasi politik yang semakin terbatas kemampuannya untuk mengoreksi konflik dan mengendalikan konsentrasi kekuasaan.

Sintesis Temuan dan Kebaruan Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegagalan Demokrasi Terpimpin merupakan proses kumulatif yang lahir dari interaksi antara kondisi struktural, transformasi kelembagaan, dinamika elite, relasi sipil–militer, pengendalian ruang publik, dan perubahan kapasitas masyarakat sipil. Dalam kerangka ini, personalisasi kekuasaan Soekarno tetap penting dalam historiografi, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan proses tersebut. Pengaruh otoritas individual menjadi sistemik karena berlangsung dalam konfigurasi kelembagaan, struktur politik, dan koalisi elite yang turut membentuk arah perkembangan rezim.

Triadic Breakdown Mechanism memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, secara teoretis, penelitian ini menggeser fokus dari pencarian penyebab tunggal menuju analisis interaksi antarmekanisme, terutama antara dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional. Kedua, secara empiris, kasus Indonesia 1959–1965 menunjukkan bahwa dinamika yang dalam literatur kontemporer dikenal sebagai *executive aggrandizement*, *elite polarization*, dan *institutional erosion* juga dapat ditemukan dalam konteks politik pascakolonial, meskipun bentuk dan perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi historis yang berbeda. Ketiga, secara konseptual, *GDDBM* mengintegrasikan transformasi kelembagaan, dinamika elite, relasi sipil–militer, kontrol media, masyarakat sipil, dan transformasi rezim ke dalam satu kerangka analitis yang menjelaskan proses kemunduran demokrasi secara lebih utuh.

Kebaruan penelitian ini tidak terletak pada klaim bahwa Demokrasi Terpimpin merupakan kasus pertama atau satu-satunya keruntuhan demokrasi. Kontribusinya justru terletak pada penggunaan pengalaman historis Indonesia untuk menjelaskan bagaimana interaksi antarmekanisme dapat mendorong kemunduran demokrasi hingga berkembang menjadi keruntuhan. Perspektif ini memperluas historiografi Demokrasi Terpimpin dari pendekatan yang berfokus pada figur dan peristiwa menuju analisis mengenai mekanisme serta keterkaitan antarkomponen dalam sistem politik. Dengan demikian, pengalaman Indonesia dapat ditempatkan dalam dialog dengan kajian komparatif tentang *democratic backsliding*, *democratic breakdown*, dan *autocratization*, tanpa mengabaikan kondisi historis yang secara spesifik membentuk perkembangan Demokrasi Terpimpin.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keruntuhan Demokrasi Terpimpin tidak dapat ditelusuri pada satu keputusan politik, institusi, atau aktor tertentu. Keruntuhan tersebut merupakan hasil dari proses kumulatif yang secara bertahap mengubah distribusi kekuasaan sekaligus melemahkan mekanisme yang semestinya membatasi penggunaannya. Konsentrasi kewenangan eksekutif setelah Dekrit 5 Juli 1959, pembentukan DPR-GR, melemahnya pengawasan yudisial, meningkatnya polarisasi elite, meluasnya peran politik militer, serta pembatasan terhadap media dan ruang publik secara bersama-sama mengurangi efektivitas mekanisme akuntabilitas horizontal dan vertikal.

Temuan utama memperlihatkan bahwa dominasi eksekutif, polarisasi elite, dan kelemahan institusional berkembang sebagai proses yang saling memperkuat. Perluasan kewenangan eksekutif mendorong semakin tajamnya polarisasi politik; polarisasi yang meningkat kemudian mengurangi kapasitas institusi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembatasan kekuasaan; sementara kelemahan institusional kembali menciptakan ruang yang lebih besar bagi ekspansi kewenangan eksekutif. Hubungan yang bersifat rekursif tersebut dirumuskan dalam penelitian ini sebagai *Triadic Breakdown Mechanism*, yang menjelaskan bagaimana kemerosotan pada satu dimensi dapat mempercepat pelemahan dimensi lainnya hingga mendorong terjadinya keruntuhan demokratis.

Berdasarkan perspektif tersebut, Demokrasi Terpimpin lebih tepat dipahami sebagai suatu trajektori kemunduran demokrasi menuju keruntuhan demokratis, bukan sebagai penghapusan institusi demokratis secara tiba-tiba. Perubahan berlangsung secara bertahap melalui pergeseran fungsi, otonomi, dan distribusi kewenangan antarlembaga. Perspektif ini menempatkan pengalaman Indonesia dalam dialog dengan kajian komparatif mengenai *executive aggrandizement*, polarisasi elite, erosi institusional, dan otokratisasi, tanpa mengabaikan konteks historis yang secara khusus membentuk pengalaman Demokrasi Terpimpin.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengalaman Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa keberlangsungan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan institusi formal, tetapi juga pada berfungsinya *checks and balances* serta

mekanisme akuntabilitas horizontal dan vertikal secara efektif. Ketika mekanisme tersebut secara bertahap melemah, institusi yang pada awalnya dirancang untuk membatasi kekuasaan dapat mengalami perubahan fungsi dan justru menjadi bagian dari proses yang memfasilitasi konsentrasi serta perluasan kewenangan politik.

Saran

Bertolak dari temuan penelitian, terdapat sejumlah agenda yang dapat dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperluas kajian akademik maupun untuk memperkuat fondasi kelembagaan demokrasi.

Pertama, pada ranah teoretis dan akademis, penelitian mendatang dapat menguji lebih jauh keberlakuan *Mekanisme Runtuhnya Triadik* melalui kajian sejarah komparatif yang melibatkan berbagai negara, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perbandingan lintas negara tersebut dapat membantu mengungkap pola-pola yang bersifat umum sekaligus menunjukkan variasi yang muncul karena perbedaan konteks sejarah, politik, dan kelembagaan. Penggunaan data kuantitatif mengenai perkembangan demokrasi yang dipadukan dengan analisis historis kualitatif juga dapat memberikan dasar empiris yang lebih kuat untuk menguji model sekaligus memperluas penerapannya pada kasus-kasus lain.

Kedua, dari sisi kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan efektivitas *checks and balances* perlu terus dipertahankan melalui penguatan independensi lembaga legislatif dan yudisial, perlindungan terhadap kebebasan media, pemeliharaan ruang publik yang terbuka, serta jaminan terhadap otonomi masyarakat sipil. Upaya tersebut tidak

cukup hanya bertumpu pada desain kelembagaan, tetapi juga perlu diikuti dengan penguatan kapasitas partai politik dan institusi demokratis dalam menghadapi perbedaan dan polarisasi politik. Dialog, negosiasi, dan kompromi perlu menjadi bagian dari praktik politik agar konflik kepentingan tidak berkembang menjadi persaingan yang melemahkan institusi demokrasi itu sendiri.

Ketiga, dalam kaitannya dengan Indonesia kontemporer, pengalaman Demokrasi Terpimpin memperlihatkan bahwa ketahanan demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan dan institusi formal. Demokrasi juga membutuhkan komitmen terhadap norma, etika, serta batas-batas dalam penggunaan kekuasaan. Atas dasar itu, pendidikan demokrasi, penguatan etika politik, dan peningkatan literasi publik mengenai persoalan demokrasi perlu dikembangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kapasitas warga negara dan aktor politik. Dengan kapasitas tersebut, masyarakat dan institusi politik diharapkan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menjalankan fungsi akuntabilitas, mengawasi penggunaan kekuasaan, dan mengenali gejala erosi institusional sebelum berkembang menjadi kemunduran demokrasi yang lebih mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiputri, R. (2018). *The empowerment of parliament in the transition from an authoritarian to a democratic regime : indonesian experiences and problems*. 6755.
<https://doi.org/10.1080/02606755.2018.1427319>
Article, O. (2025). *Pandemic politics : The*

- acceleration of democratic erosion and autocratization in Indonesia during. 2024, 475–503.*
<https://doi.org/10.1007/s12286-025-00634-1>
- Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., Warburton, E., Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., Warburton, E., & Aspinall, E. (2020). *Elites , masses , and democratic decline in Indonesia Elites , masses , and democratic decline in Indonesia. 0347.*
<https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971>
- Azwar, A., Suryana, M. J., Pascasarjana, M., Politik, I., & Nasional, U. (1998). *Dwifungsi tni dari masa ke masa. 4, 154–179.*
- Baidhowah, A. R. (2021). *Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding. 7(1).*
- Barton, G., & Yilmaz, I. (2021). *Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia. 1–20.*
- Berlucchi, A. B., Kellam, M., & Berlucchi, A. B. (2023). *Who ' s to blame for democratic backsliding: populists , presidents or dominant executives ? 0347.*
<https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2190582>
- Besley, T., Prat, A., Besley, T., & Prat, A. (2005). *Handcu □ s for the Grabbing Hand? Media Capture and Government Accountability. July.*
- Carroll, E. C., & Carroll, E. C. (2024). *Scholarship @ GEORGETOWN LAW Beyond the Watchdog : Using Law to Build Trust in the Press. 47–60.*
- Conceptualizing and Measuring Autocratization Episodes. (2021).*
27(2), 434–448.
<https://doi.org/10.1111/spsr.12437>
- Dan, I., & Politik, K. (2025). *No Title. 10.*
- Djindan, M., & Harjanto, I. (2021). *The Politics of Civil Society Forms : Urban Environmental Activists and Democracy in. 9(1), 47–63.*
- Druckman, J. (2023). *How to Study Democratic Backsliding.*
- Eka, B., Widodo, C., & Purwaningsih, T. (2023). *Civil Societies and Issues of The Decline of Democracy in Indonesia (Issue Icsp). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-194-4*
- Fajri, P. C., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). *DINAMIKA POLITIK KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959) Pujangga Candrawijayaning Fajri pelanggaran prinsip-prinsip konstitusionalisme ? dan apakah langkah-langkah. 05(1), 71–92.*
<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Frantz, E., Şimşek, A. K. C., & Wright, J. (2025). *Democratic Backsliding and Endogenous Polarization. Schmemann 2023.*
- Grillo, E., Luo, Z., Nalepa, M., & Prato, C. (2024). *Theories of Democratic Backsliding. 381–400.*
- Hati, L. P., Dara, L., & Utami, C. (2022). *Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965 : Soekarno , TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia. 6(2), 161–180.*
- Haven, N., & Hall, G. (2015). *Unwelcoming Change : Understanding , Evaluating , and Extending Theories of Democratic Backsliding.*

- Hidayat, A. A., Nurjaman, A., Ahmad, J., Witro, D., & Alghani, R. (2022). *NAHDLATUL ULAMA IN FACING THE GUIDED DEMOCRACY 1959-1965 : AN OVERVIEW OF SOCIAL AND POLITICAL FACTORS*. 567–598.
<https://doi.org/10.31291/jlka.v20.i2.1069>
- Ibrahim, H. (2023). *No Title*. 7(1), 377–398.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.16650>
- Inpantri, A. G., Ikbaarshaff, M., Siddiq, H., & Alhabsy, M. I. (2022). *The Role and Development of the Function of ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) in the New Order Period*. 1(2), 191–200.
- Jee, H., Lueders, H., & Myrick, R. (2021). Towards a unified approach to research on democratic backsliding. *Democratization*, 0(0), 1–14.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2021.2010709>
- Journal, K. (2025). *The Development of Indonesian Press Freedom in the Period of Old Order (1950-1965) Andi Sebastian*. 7(1), 1–32.
- Kasuya, Y., & Tan, N. (2024). *Introduction : Democratic backsliding in Southeast Asia*. 9(1), 3–8.
<https://doi.org/10.1177/20578911231223771>
- Kaufman, R. R., Kelemen, R. D., & Kolcak, B. (2025). *Federalism and Democratic Backsliding in Comparative Perspective*. 23(1), 15–34.
<https://doi.org/10.1017/S1537592724000604>
- Konstitusionalitas, A., & Presiden, D. (2021). *MENURUT HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*. 1(3), 431–448.
- Kunci, K. (2023). *Lekra ' s short stories (1950 — 1965) as a strategy for the political struggle of the PKI A .* Pendahuluan menentukan arah sistem pemerintahannya . Pada tahun tersebut , sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi liberal , yang di dalamnya terdiri dari kabinet-kabinet yang disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan partai , sehingga konflik antar partai politik kerap terjadi dan mengakibatkan sering terjadinya perubahan kabinet . Pada masa demokrasi liberal di Indonesia , kekuatan partai menjadi hal yang dinomorsatukan . Para benar-benar memiliki kekuatan di dalam kekuasaan . Majelis Syuro Muslimin Indonesia Ketika akan diselenggarakannya pemilu pertama pada tahun 1955 , kontestasi politik semakin memanas , partai politik atau organisasi masyarakat saling bersaing dalam memengaruhi dan mengorganisir massa untuk menjadi partai yang besar . Salah satu alat lembaga kebudayaan , sehingga tidak mengherankan apabila di balik lembaga-lembaga (2012) mencatat bahwa pada periode (1950 — 1960an) , konfrontasi terkait budaya Indonesia ada . Misalnya , Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) menjadi alat politik PNI , Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi) menjadi alat Partai Indonesia (Partindo) , Lembaga Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) menjadi alat Nahdhatul Ulama (NU) , Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi) menjadi alat Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti) , Himpunan Seni

- Budaya Islam (HSBI) menjadi alat Masyumi , Lembaga Kebudayaan Seni Muslim Indonesia (Laksmi) menjadi alat Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) , dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) menjadi alat PKI (Susanto , 2018) . Di antara lembaga-lembaga kebudayaan pada masa itu , Lekralah yang paling mendapat perhatian masyarakat khususnya para seniman dan budayawan Indonesia . Keanggotaan Lekra yang pada mulanya hanya terdiri dari beberapa orang saja menjadi lebih dari 500 . 000 . Dan anggota-anggota itu tergabung lembaga sastra dan seni dari Lekra (Aidit , 1964) . A . S . Dharta (Foulcher , 1986) . Kelahiran Lekra dinilai sebagai reaksi terhadap realitas politik kultural yang mencemaskan serta melihat jelas , bahwa pengucapan kebudayaan dan sastra khususnya harus berdasarkan realitas yang sedang berkembang , dan pengucapan- pengucapan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara politik (Toer , 2003) . Menurut kesadaran dan keyakinan akan datangnya kemenangan . Terutama sejak tahun 1951 , yaitu tahun kelahiran kembali PKI , pengintegrasian sastra dan seni dengan massa.... 6, 1055–1070.*
- Lit, J. Van, Ham, C. Van, & Meijers, M. J. (2024). *Countering autocratization : a roadmap for democratic defence.* 0347.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2279677>
- Mietzner, M. (2025). *in Indonesia : Executive. March 2024,* 223–234.
<https://doi.org/10.1177/00027162241309436>
- Mubarok, F. N., & Puspita, M. B. (2022). *The Military and Political Parties in Indonesia : The Ups and Downs of the Military ' s Political Role.* 1(2), 183–190.
- No Title. (1960). 3(1).
- Nuraniyah, N. (2020). *Divided Muslims : militant pluralism , polarisation and democratic backsliding.* 81–100.
- Nurjaman, A., Yusuf, M., & Witro, D. (2022). *Nahdlatul Ulama Theological Basis in Accepting the Concept of Guided Democracy 1959-1965 teachings (Duta Masyarakat , 1957) . This disapproval sentiment continued to be Soekarno was only for the benefit of President Soekarno , and he added that the immediately disbanded without anyone or a single party defending him . The League of Democracy has many enemies who are pro-guided democracy . When Imron Rosjadi from NU and Anwar Harjono from Masyumi attended a general meeting in Surabaya on 15 May 1960 to give speeches in order.* 8(2), 345–362.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5964>
- Permusyawaratan, M., & Sementara, R. (1960). *No Title.* 2, 1959–1960.
- Pramestuti, A. W., Rochwulaningsih, Y., & Sulistiyono, S. T. (2022). *PNI Political Strategy to Win the 1955 Election in Indonesia.* 6(2), 45–59.
- Prayogi, A., & Nasrullah, R. (n.d.). *Democracy During the Old Order : A Study of Historical Characteristics.*
- Quah, S. J. (2026). *An anatomy of worldmaking : Sukarno and anticolonialism from post-Bandung*

- Indonesia. February 2025, 571–586.
<https://doi.org/10.1111/ajps.12963>
- Rahman, A. (2020). *The Appearance of the Military as A Political Force in Indonesia*. 473(Icss), 589–593.
- Rivera-Escartin, A. (2024). Elite polarization and democratic backsliding in Tunisia: tracing agency-driven mechanisms. *Democratization*, 31(4), 871–890.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2284873>
- Rumesten, I., & Adisti, N. A. (2022). *Hasanuddin LawReview Phenomenon of the Increasing Single Candidates and*. 3(3), 248–257.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v8i3.2880>
- Schwinges, A., Meer, T. G. L. A. Van Der, Vliegenthart, R., Schwinges, A., Meer, T. G. L. A. Van Der, & Vliegenthart, R. (2025). Are News Media Biting Hard Enough ? Public Watchdog Role Expectations and Performance Evaluations in the Era of Big Tech Are News Media Biting Hard Enough ? Public Watchdog Role Expectations and Performance Evaluations in the Era of Big Tech. *Digital Journalism*, 13(5), 949–969.
<https://doi.org/10.1080/21670811.2025.2485257>
- Sejarah, J. P., & Humaniora, R. S. (2024). *No Title*. 7, 1041–1050.
- Smidt, H., Johansson, J., & Richter, T. (2025). Civil Society Under Attack : The Consequences for Horizontal Accountability Institutions. *Studies in Comparative International Development*, 60(1), 81–110.
<https://doi.org/10.1007/s12116-023-09423-x>
- Studies, M. (2020). *Academica*. 4.
- SUKARNO *PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA.pdf*. (n.d.).
- Susanto, M., Harijanti, S. D., Zoelva, H., & Abdurahman, A. (2023). Should the Muslim President become a constitutional convention in Indonesia ? Based on constitutional debates about Islam and state , and the constitutional practice Should the Muslim President become a constitutional convention in Indonesia ? Based on constitutional debates about Islam and state ., *Cogent Social Sciences*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2196815>
- Teo, M. (2022). *dynamics in Southeast Asia*. 20(1), 237–271.
- Tertinggi, P., Perang, A., & Kepada, K. (1945). *Dekrit Presiden Republik Indonesia tentang*. 3–6.
- Václav Štětka *Watchdogs that only bark FINAL ACCEPTED.pdf*. (n.d.).
- Wiratraman, H. P., & Mada, U. G. (2025). *ARTISTIC FREEDOM AND LEGAL BOUNDARIES : NAVIGATING CENSORSHIP AND EXPRESSION IN INDONESIA ' S DEMOCRATIC*. 54(1), 102–114.
- Wolkenstein, F. (2023). *What is democratic backsliding ?* 261–275.
<https://doi.org/10.1111/1467-8675.12627>
- Wunsch, N., Blanchard, P., & Wunsch, N. (2023). *Patterns of democratic backsliding in third-wave democracies : a sequence analysis perspective democracies : a sequence analysis perspective*. 0347.
<https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2130260>

Yes, D. P. R. N. (n.d.). *DPR No Yes*.
Yogatama, A. (2018). *PENELITIAN
SEJARAH RELASI PUBLIK :
KONSEP DAN METODOLOGI*. 8(1),
1–6.
<https://doi.org/10.9744/scriptura.8.1.1-6>

Yusoff, M. A., & Borz, G. (2023). Power consolidation and its impact on the decline of democracy in Indonesia under President Jokowi. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 1–21.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2232579>